

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari data hasil penelitian dan pengkajian terhadap masalah yang diteliti, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang akan ditarik terutama berkenaan dengan masalah yang telah dikemukakan, yaitu :

1. Pada umumnya program atau tolok ukur yang disetujui dalam DIP untuk tiga tahun perencanaan dalam Repelita IV mempunyai relevansi terhadap UKOP sebagai usulan yang diajukan terutama yang menyangkut program perluasan kesempatan belajar/daya tampung, sedangkan untuk program lainnya yang menyangkut program peningkatan mutu, baik sarana maupun tenaga guru kurang relevan ditinjau dari jenis dan jumlah kegiatan.
2. Ditinjau dari segi biaya, pada umumnya anggaran untuk tiga tahun perencanaan dalam Repelita IV, kurang relevan antara DIP yang disetujui terhadap usulan dalam UKOP berdasarkan kebutuhan yang diestimasikan dan kebijakan Kanwil Depdikbud Jawa Barat. Pemenuhan dana untuk seluruh program dari tahun anggaran 1984/85, 1985/86, dan 1986/87 berturut-turut menunjukkan penurunan, yaitu : 4.548.656.000,- , 5.584.790.000,- dan 3.841.573.000,- sedangkan kebutuhan yang diestimasi

menunjukkan peningkatan, yaitu : 6.224.863.000,-
11.948.361.000,- dan 12.777.854.000,-

3. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan dalam DIP untuk program-program peningkatan SMA di samping disebabkan oleh kondisi keuangan pemerintah, juga terdapat perbedaan yang menyangkut; kemampuan mengestimasi anggaran, perbedaan dalam kerangka fikir, dan perbedaan kemampuan profesional dalam perencanaan antara perangkat perencana tingkat daerah dan pusat.
4. Dalam pengimplementasian program-program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIP, ternyata belum seluruh anggaran dapat direalisasikan atau dicairkan. Hal itu terlihat dari jumlah SIAP rata-rata selama tiga tahun masih sangat besar atau lebih dari 60 persen. Dengan SIAP yang cukup besar ini, artinya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana belum tercapai sesuai dengan harapan. Sejumlah faktor penyebab antara lain kemampuan profesional dalam manajemen proyek masih terbatas, keserasian sistem dan kultur masyarakat belum menunjang.
5. Dengan anggaran yang makin minim dari tahun ke tahun mempunyai implikasi atau dampak terhadap pencapaian program yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif terdapat kecenderungan untuk lebih meningkatkan enrollmen,

terutama sekolah-sekolah swasta dengan besar kelas melampaui norma yang berlaku. Sedangkan dampak kualitatif cenderung terjadi penurunan, karena dengan anggaran yang semakin kecil kualitas masukan seperti tenaga guru, sarana dan fasilitas pendidikan kurang mendapat peningkatan.

6. Dengan demikian dapat dinilai bahwa perencanaan dan implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena banyak faktor yang masih menghambat baik yang bersumber dari dalam (internal) lembaga Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat maupun yang bersumber dari luar (eksternal) lembaga. Beberapa indikator yang dapat dijadikan penghambat antara lain menyangkut aspek : 1) Profesionalisasi, 2) Kemampuan mengestimasi, 3) Mentalitas atau moral, 3) Kultur atau budaya masyarakat yang belum menunjang sepenuhnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang perlu dikemukakan berkaitan dengan hasil penelitian ini, antara lain :

1. Dengan minimnya anggaran yang tersedia, perlu adanya penajaman prioritas, penyesuaian program dan usaha peningkatan efisiensi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bersamaan dengan itu, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, serta dedikasi yang tinggi dari perencana dan pelaksana proyek.

2. Penerapan pendekatan sistem di lingkungan Depdikbud, terutama di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini erat sekali dengan sifat pekerjaan ini yang menuntut kemampuan analisis yang didukung dengan dengan sistem informasi yang fungsional. Oleh karena itu perlu dipikirkan usaha peningkatan kemampuan/keterampilan dan pengadaan unit sistem informasi, baik di tingkat pusat, Kanwil propinsi dan Kandep-kandep. Unit ini hendaknya dapat berfungsi menyediakan berbagai informasi, baik informasi internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi maupun informasi eksternal yang mencakup keadaan sosial, ekonomi, teknologi dan politik atau kebijakan pemerintah. Dengan demikian bagian perencanaan tidak terfokus pada pengumpulan data, tetapi dapat berfungsi leboh dari itu.
3. Rencana proyek-proyek hendaknya berorientasi sesuai dengan tuntutan Kurikulum yang berlaku, baik dalam perencanaan proyek-proyek fisik maupun nonfisik, terutama yang menyangkut program khusus B. Sesuai dengan Kebijaksanaan pembangunan Jawa Barat, maka DIP yang disediakan hendaknya berorientasi pada penyediaan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia dan potensi yang dapat dikembangkan.

4. Perlu dipikirkan upaya pengadaan Kerangka Pengembangan Pendidikan Jangka Panjang atau semacam Renstra di lingkungan Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Dengan adanya Renstra, konsep program operasional dan rencana operasional tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai tolok ukur dijabarkan dari Renstra. Di samping itu, kemungkinan timbulnya kekeliruan arah pengembangan pendidikan, prioritas program dan penganggaran dapat dikurangi. Perlu diingat bahwa salah satu prinsip dalam perencanaan, yaitu adanya kontinuitas dalam pengembangan program dari tahun ke tahun. Dalam hubungan ini Renstra memberikan kemungkinan untuk mengembangkan aspek kontinuitas program.
5. Meskipun penelitian ini lebih memfokuskan diri terhadap hasil perencanaan yaitu rencana, tetapi tidak dapat terlepas dari proses perencanaan. Dalam hal ini konsep demokratisasi dalam pengambilan keputusan, menekankan pada proses bagaimana keputusan itu dibuat, bukan sekedar ketepatan keputusan. Apabila konsep ini dilaksanakan, kasus adanya tolok ukur dalam DIP tanpa usulan dari daerah tidak akan terjadi. Dengan demikian keseimbangan rencana merupakan perpaduan antara hasil perencanaan daerah dan pusat.

6. Perlu adanya usaha ke arah penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan tahunan terpadu di tingkat Kanwil Propinsi yang menekankan perlunya perbaikan dalam : a) Data dan informasi yang valid dan akurat, b) Koordinasi intern dan ekstern, c) Kemampuan profesional perangkat perencana terutama dalam penyusunan program-program sesuai dengan prioritas, dan d) Pelaksanaan monitoring implementasi rencana dan program.
7. Keterlibatan para pengawas dalam menangani proyek-proyek pembangunan perlu dipertimbangkan kembali. Di samping tugas dan tanggungjawabnya selaku pembina pendidikan atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terhadap sekolah yang menjadi tanggungjawabnya yang sudah terlalu berat, ditambah kemampuan profesional dalam hal manajemen proyek yang sangat terbatas. Sehubungan dengan itu, perlu kebijakan baru yang menyangkut siapa yang tepat untuk mengelola atau menangani proyek. Hal ini sangat penting agar jumlah SIAP yang terlalu besar dapat ditekan sekecil mungkin.
8. Keterlibatan para Kepala Sekolah secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan, mengingat kedudukannya yang paling banyak mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi

sekolah. Keterlibatan Kepala Sekolah dalam penyusunan rencana akan membawa dampak positif terutama dalam pengembangan atau pembinaan kemampuan, kreativitas dan motivasi. Di samping itu secara psikologis Kepala Sekolah merasa dihargai, diakui eksistensinya sebagai penanggungjawab di sekolahnya. Peranannya selaku penanggungjawab pendidikan di sekolahnya, menuntut adanya kemampuan dalam pengambilan keputusan, pemberian kesempatan turut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sampai saat ini Kepala Sekolah peranannya hanya sebagai pelaksana teknis. Namun demikian, apabila dalam kondisi seperti sekarang di mana anggaran pembangunan tidak menggembirakan, Kepala Sekolah dituntut untuk membantu memanggulangi masalah kekurangan dana. Karena itu tidak sedikit Kepala Sekolah berperan dalam meningkatkan perolehan dana masyarakat untuk pembinaan pendidikan melalui Badan Pembantu Pembinaan Pendidikan (BP3).

9. Upaya meningkatkan peran Kepala Sekolah dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan sangat diperlukan, di samping pertimbangan teknis karena sehari-hari sering ada di sekolah (terutama pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, bengkel kerja), juga pertimbangan non-teknis, yaitu menanamkan rasa memiliki dan tanggungjawab.

10. Sangat dituntut adanya usaha ke arah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan penggunaan sarana, fasilitas yang telah dibangun dan tersedia. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan baik dalam bentuk efisiensi secara kuantitatif maupun efisiensi dalam bentuk kualitatif. Dalam penggunaan anggaran DIP, pencapaian efisiensi akan banyak ditentukan oleh pengawas selaku pimpro, sedangkan dalam penggunaan sarana pendidikan akan banyak tergantung dari para Kepala Sekolah sebagai pengguna. Tentu saja pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kecakapan, ketrampilan baik teknis maupun manajerial. Itulah sebabnya upaya peningkatan kemampuan ataupun pengembangan personil baik secara formal maupun non-formal, hendaknya diperhatikan. Melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan personil diharapkan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan dapat dicapai.